

ANALISIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA (STUDI KASUS PADA LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS DI KOTA CIREBON)

Endang Herawan¹, Enceng Yana²

FKIP Unswagati Cirebon

endangherawan@fkip-unswagati.ac.id

fajarcirebon@gmail.com

ABSTRAK

Hak untuk memperoleh pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara agar setiap warga negara Indonesia memiliki bekal pendidikan yang berguna bagi dirinya maupun untuk kemajuan bangsa. Pendidikan dapat diperoleh melalui jalur formal, non formal dan informal. Lembaga pendidikan nonformal seperti lembaga kursus merupakan jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Pembiayaan pendidikan pada lembaga kursus seluruhnya bersumber dari dana masyarakat, sehingga permasalahan dalam makalah ini adalah bagaimana upaya strategis lembaga kursus dalam menghimpun dana untuk pembiayaan pendidikan, dan bagaimana pengelolaan lembaga kursus dalam hal mengembangkan mutu dan relevansi sebagai alternatif pendidikan bagi masyarakat. Makalah ini mengungkapkan upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh lembaga pendidikan swasta (kursus) dalam menghimpun dana dan mengembangkan mutu serta relevansi dengan kebutuhan dunia kerja ialah dengan membangun strategi kemitraan, baik dengan pihak pemerintah maupun pihak swasta lainnya, peningkatan mutu pendidikan diupayakan dengan mengutamakan pengalokasian pada aspek yang menyentuh proses belajar mengajar.

Kata Kunci : Analisis Pembiayaan Pendidikan, Lembaga Pendidikan Swasta

I. PENDAHULUAN

Masyarakat sebagai lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pribadi seseorang. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya ikut serta menyelenggarakan pendidikan, karena membantu pengadaan sarana dan prasarana dan menyediakan lapangan kerja. Partisipasi masyarakat membantu pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Di dalam konteks pembangunan manusia seutuhnya, keluarga, Lembaga Pendidikan dan masyarakat akan menjadi pusat-pusat kegiatan pendidikan yang akan menumbuhkan dan mengembangkan anak sebagai makhluk individu, sosial, susila dan religius. Dengan memperhatikan bahwa anak adalah individu yang berkembang, ia membutuhkan pertolongan dari orang yang telah dewasa, anak harus dapat berkembang secara bebas, tetapi terarah. Karenanya pendidikan harus dapat memberikan motivasi dalam mengaktifkan anak.

Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian keterampilan dan keahlian. yaitu dalam hal pendidikan intelektual, spiritual, serta keahlian/ keterampilan. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 tercantum bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Salah satu jalur pendidikan yang disebutkan di atas yaitu jalur pendidikan non formal merupakan pendidikan diluar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Masyarakat memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan, hal ini dapat diwujudkan dengan mendirikan atau menyelenggarakan pendidikan non formal. Dalam penyelenggaraan pendidikan non formal tentu berbeda penyelenggaraannya baik dari aspek legalitas pendirian maupun dari aspek pengelolaannya. Salah satu hal yang menjadi persoalan selama ini yaitu pengelolaan keuangan, dimana hal ini mencakup sumber pendanaan dan alokasi dana itu sendiri. Dana pendidikan non formal seluruhnya berasal dari masyarakat, kecuali untuk bantuan-bantuan yang sifatnya bantuan dari pemerintah seperti yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Masyarakat dengan program unggulannya yaitu Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW). Program pemerintah yang berasal dari Kementerian

Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas berupa bantuan program pelatihan kerja. Pengelola pendidikan non formal tentunya harus menyiapkan berbagai strategi agar sumber dana yang diterima berlangsung secara terus menerus.

Ada beragam sumber dana yang dimiliki oleh lembaga pendidikan non formal, baik kemitraan dengan instansi pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan jujur. Pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua pengelola pendidikan non formal. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara lembaga yang satu dengan yang lainnya.

Kota Cirebon merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi unggulan diberbagai sektor, letaknya yang strategis yaitu kabupaten Indramayu, kabupaten majalengka dan Kabupaten Kuningan Sehingga secara Wilayah sering disngkat sebagai daerah Ciayumajakuning). Kota Cirebon dijadikan kota transit ke kota-kota besar sehingga menjadi kota yang banyak dikunjungi oleh orang-orang dari daerah lain. Kota Cirebon dipersiapkan menjadi kota metropolitannya Provinsi Jawa Barat, hal ini dikarenakan memiliki akses ke bandara internasional yang sedang dipersiapkan dan juga daerah yang sangat dekat dengan pelabuhan. Untuk mendukung dan mewujudkan daerah yang unggul maka perlu juga mengembangkan sumber daya manusianya. Pengembangan sumber daya manusia ini dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini pendidikan non formal dapat mengambil peran sebagai lembaga yang dapat mengembangkan sumber daya manusia yang unggul. Kota Cirebon terdapat 107 lembaga pendidikan non formal khususnya lembaga kursus yang memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) dengan jenis kegiatan yang beragam. Potensi yang ada tentunya harus dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara kursus khususnya dalam menggali sumber dana lembaga itu sendiri. Semakin banyaknya lembaga kursus yang ada di Kota Cirebon tentunya akan membawa dampak baik bagi lembaga non formal (kursus) itu sendiri maupun bagi pemerintah daerah. Kecenderungan lembaga pendidikan non formal (kursus) untuk mencari sumber pendanaan dilakukan dengan berbagai strategi atau cara. Dilatar belakangi oleh permasalahan tersebut diatas, penulis menyusun sebuah makalah yang membahas tentang analisis pembiayaan pendidikan swasta.

a. Rumusan Masalah

Pembiayaan pendidikan pada lembaga kursus seluruhnya bersumber dari dana masyarakat, sehingga permasalahan makalah ini adalah

- a). Bagaimana upaya strategis lembaga pendidikan swasta (kursus) dalam menghimpun dana untuk pembiayaan pendidikan?
- b). Bagaimana pengelolaan lembaga kursus dalam hal mengembangkan mutu dan relevansi sebagai alternatif pendidikan bagi masyarakat?

b. Tujuan

Tujuan Makalah ini yaitu:

- a). Untuk mengetahui upaya strategis lembaga pendidikan swasta (kursus) dalam menghimpun dana untuk pembiayaan pendidikan
- b). Untuk mengetahui pengelolaan lembaga kursus dalam hal mengembangkan mutu dan relevansi sebagai alternatif pendidikan bagi masyarakat

II. PEMBAHASAN: UPAYA STRATEGIS LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA (KURSUS) DALAM MENGHIMPUN DANA UNTUK PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UUSPN No. 20 Tahun 2003). Pendidikan dipandang sebagai salah satu faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas kerja tenaga terdidik (Harbison dan Myers, 1964). Hal ini sejalan dengan fungsi pendidikan yang tertuang dalam Pasal 3 UUSPN No.20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam mengelola Pendidikan non Formal terdapat dua faktor yang turut menentukan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Faktor yang pertama adalah faktor eksternal antara lain masyarakat yang merupakan konsumen yang turut menentukan keberhasilan suatu pendidikan, oleh karena itu masyarakat perlu diikutsertakan dalam pengelolaan lembaga pendidikan mulai

dari perencanaan sehingga memahami seluruh kebutuhan Lembaga Pendidikan, terutama yang menyangkut sumber dana yang diperlukan oleh lembaga pendidikan. Di samping itu masyarakat juga termasuk di dalamnya (faktor eksternal) adalah kebijakan pemerintah, faktor lingkungan, politik, sosial dan budaya, serta perkembangan tingkat ekonomi, situasi dan kondisi suatu negara.

Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor internal termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang langsung berkaitan dengan pengelolaan Lembaga Pendidikan antara lain: pengelolaan/manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen kurikulum, manajemen hubungan Lembaga Pendidikan dan masyarakat, manajemen peserta didik, pengawasan dan penilaian pendidikan. Faktor eksternal dan internal adalah dua faktor yang saling berpengaruh di mana keduanya merupakan hal yang sama-sama berfungsi dan berperan dalam pencapaian tujuan. Masyarakat instansi Pemerintah, swasta, dunia usaha dan Industri sebagai pengguna jasa turut bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan dengan cara berpartisipasi dalam pengadaan dana, karena salah satu faktor penyebab belum tercapainya kualitas, adalah karena keterbatasan dana untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Seperti diharapkan oleh semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). (Idochi Anwar 2000:87).

Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan salah satu substansi pengelolaan lembaga pendidikan akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di lembaga pendidikan itu sendiri. Sebagaimana yang terjadi di substansi pengelolaan pendidikan pada umumnya, kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Beberapa kegiatan pengelolaan keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggung jawaban (Lipham, 1985; Keith, 1991).

Berikut ini upaya strategis lembaga pendidikan swasta (kursus) dalam menghimpun dana untuk pembiayaan pendidikan, antara lain:

1. Menarik Dana Langsung dari masyarakat dalam bentuk Biaya kursus yang terjangkau
2. Segmentasi pasar siswa kursus untuk anak-anak. Misalnya anak-anak Lembaga Pendidikan taman kanak-kanak dan anak SD dengan program yang menarik dan mendidik
3. Memanfaatkan media sosial dan penjualan jasa, maupun barang secara *online*
4. Membangun komunikasi dengan Dunia usaha dan industri untuk menjalin kerjasama pelatihan keterampilan dengan konsep kerjasama saling menguntungkan, artinya pihak perusahaan bisa melatih calon tenaga kerja dengan *low Cost* biaya rendah. Dari hasil kerjasama yang saling menguntungkan ini pihak lembaga pendidikan swasta (lembaga kursus) bisa memperoleh dana. Hal ini dilakukan oleh beberapa kursus mengemudi untuk tenaga supir baik dalam maupun luar negeri contoh yang dilakukan oleh LKP Ekajaya Berindo
5. Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan dalam hal pelatihan Komputer. Kurikulum 2013 mengisyaratkan mata pelajaran TIK khususnya computer banyak di beberapa Lembaga Pendidikan dihilangkan hal ini dengan alasan bahwa semua guru mengaruskan melek teknologi informasi. Sementara sekarang dituntut Lembaga Pendidikan melakukan Ujian nasional Berbasis Komputer. Ini merupakan kebijakan yang berbuah menjadi peluang. Hal ini yang dilakukan oleh lembaga pelatihan Fajar College Centre di kota Cirebon.
6. Kerjasama menyewakan peralatan kepada Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan yang tidak memiliki sarana computer yang cukup untuk UNBK
7. Kerjasama perawatan dan pemeliharaan computer, Jasa service, jasa Instal. dan jasa pembuatan Jaringan.
8. Kerjasama pemasangan CCTV
Dan masih banyak lagi yang bias digarap yang penting setiap manajer kursus pandai membaca peluang

III. PEMBAHASAN: PENGELOLAAN LEMBAGA KURSUS DALAM HAL MENGEMBANGKAN MUTU DAN RELEVANSI SEBAGAI ALTERNATIF PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT

Agar pengelolaan anggaran Lembaga Pendidikan tidak terjadi pemborosan dan dapat dihitung keuntungan (*benefit*) yang diperoleh adalah penting untuk menentukan kebutuhan program apa saja yang perlu dibiayai dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, untuk mendapat keuntungan pengelolaan harus dihitung sesuai prinsip ekonomi pendidikan. Cohn, Elchanan (1979:8) mengemukakan bahwa isu utama dalam ekonomi pendidikan menyangkut identifikasi dan ukuran nilai ekonomi bagi pendidikan, alokasi sumber-sumber dalam pendidikan, gaji instruktur, biaya pendidikan, dan perencanaan pendidikan.

Nanang Fattah (2000:79) menyampaikan analisis Bank Dunia yang menunjukkan bahwa investasi pendidikan sebagai kegiatan inti pengembangan SDM terbukti telah memiliki sumbangan yang sangat signifikan terhadap tingkat keuntungan ekonomi. Berdasarkan temuan studi tersebut bahwa keuntungan ekonomi (*rate of return*) investasi pendidikan ternyata lebih tinggi daripada investasi fisik dengan membandingkan rata-rata 15,3% dan 9,1%. Ini berarti bahwa investasi pendidikan merupakan upaya yang menguntungkan, baik secara sosial maupun ekonomis.

Untuk menentukan apakah penyelenggaraan pendidikan memberi keuntungan, maka perlu dilakukan analisis kebutuhan. Tujuan analisis dalam biaya pendidikan adalah untuk: *pertama*, menganalisis investasi dalam pendidikan dan kedua mempelajari hubungan antara keuntungan dari Lembaga Pendidikan dan investasi pendidikan. Agar analisis biaya dapat digunakan secara tepat guna, harus digabung dengan analisis terhadap proses belajar mengajar, yaitu suatu analisis terhadap keluaran yang dihasilkan oleh pendidikan. Tolok ukur yang dapat dilihat dari analisis ini adalah perbandingan antara mutu lulusan dengan biaya yang sudah diinvestasikan. "Perhitungan biaya akan ditentukan oleh komponen kegiatan pendidikan dan biaya satuan. Komponen kegiatan pendidikan ini meliputi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti ruang belajar, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, alat pelajaran, buku pelajaran/buku perpustakaan, perabot Lembaga Pendidikan dan alat tulis menulis" Oleh karena itu *cost* adalah perhitungan atau biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terkait dalam pendidikan. Seperti apa yang dikemukakan oleh H.M. Levin (1987:426) sebagai berikut:

"School finance refers to the process by which tax revenues and other resources are derived for the formation and operation of elementary and secondary schools as well as the process by which those resources are allocated to school in different geographical areas and to types and levels of education".

Apa yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa keuangan Lembaga Pendidikan merupakan sumber daya yang diterima dan digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan di Lembaga Pendidikan yang mengandung konsekuensi bagi Lembaga Pendidikan, yaitu Lembaga Pendidikan harus mengelola sumber dana tersebut secara efektif dan efisien untuk menunjang pelaksanaan pendidikan. Biaya pada lembaga pendidikan biasanya meliputi: *Direct cost* dan *indirect cost*. *Direct cost* (biaya langsung) yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan, biaya langsung akan berpengaruh terhadap output pendidikan. Biaya langsung ini meliputi gaji instruktur dan personil lainnya, pembelian buku, fasilitas kegiatan belajar mengajar, alat laboratorium, buku pelajaran, buku perpustakaan dll, biaya langsung untuk pengajaran harus memenuhi unsur sebagai berikut; inheren pada hasil, kuantitatif dapat dihitung, tak dapat dihindarkan, *indirect cost* (biaya tidak langsung) ialah biaya yang dipergunakan siswa agar dapat melaksanakan pendidikan. Biaya tidak langsung meliputi biaya hidup, transportasi, dan biaya biaya lainnya. *Social cost and Private cost*, *social cost* dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya Lembaga Pendidikan yang harus dibayar oleh masyarakat. Sedangkan *private cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai Lembaga Pendidikan anaknya, dan termasuk di dalamnya *forgone opportunities* (biaya kesempatan yang hilang). Cohn Elchanan (1979) mengemukakan biaya merupakan unsur yang sangat penting dan menentukan dalam mekanisme penganggaran. Biaya akan mempengaruhi pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Konsep efektivitas biasanya dihubungkan dengan upaya pencapaian perolehan hasil yang diharapkan, dalam pendidikan efektivitas diartikan sebagai suatu keadaan di mana tujuan adalah merupakan suatu keberhasilan. Sedangkan efisiensi diartikan sistem pendidikan dapat dinilai memiliki efisiensi bila tujuan yang dikendaki diperoleh secara maksimal melalui daya dan dana yang minimal.

Investasi dalam pembiayaan pendidikan secara global digolongkan ke dalam: (1) Yang menyangkut gaji personil, (2) Yang menyangkut kegiatan siswa, (3) Yang berhubungan dengan bangunan, sarana dan prasarana termasuk pemeliharaannya. Strategi penentuan kebutuhan biaya di Indonesia menjadi teramat penting, terlebih-lebih apabila dikaitkan dengan pembangunan Nasional Indonesia, yang tidak dapat dipisahkan dari kebijaksanaan penentuan anggaran untuk pembangunan pendidikan nasional seperti menetapkan program prioritas bidang pendidikan Nasional antara lain: (1) Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, (2) Peningkatan mutu pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan, (3) Peningkatan relevansi pendidikan dan atau keterkaitan dan keterpaduan (link and match) antara Lembaga Pendidikan dan kebutuhan masyarakat, (4) Pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (5) Pembinaan kebudayaan nasional yang ditujukan untuk memperkuat jati diri dan berkepribadian bangsa. (Pokja, 1999:1).

Kelima program pendidikan di atas tentu saja bukan hanya slogan, tetapi betul-betul program yang harus direalisasikan yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Pembangunan pendidikan akan dapat berjalan dengan baik memenuhi standar yang dipersyaratkan dan dapat

mencapai tujuan jika didukung oleh dana atau biaya program Lembaga Pendidikan sesuai kebutuhan riil Lembaga Pendidikan. Dalam hal kebutuhan ini muncul konflik kepentingan secara politis, antara program pembangunan pendidikan dengan pembangunan lainnya di mana masing-masing mengatakan bahwa programnya yang lebih penting. Terlepas dari perdebatan tersebut, Lembaga Pendidikan sebagai pelaksana terdepan dalam program pembangunan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan, tentu memerlukan standar kebutuhan anggaran baik dalam ukuran yang paling minimum maupun ideal. Agar kualitas kompetitif yang dipersyaratkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa dapat terpenuhi, lebih dahulu perlu dirumuskan kedudukan kebutuhan untuk memberi pemahaman yang tepat khususnya berkaitan dengan kebutuhan Lembaga Pendidikan. Witkin (1984:5) mengutip pendapat Maslow mendefinisikan kebutuhan sebagai sesuatu yang diinginkan seseorang dalam konsistensi yang mencukupi, dan diperlukan sebagai satu ciri dari personalitinya, yang juga perlu dipahami untuk menyatakan sebuah kondisi atau keadaan, seperti tingkat kebutuhan, baik dari kebutuhan fisik sampai aktualisasi diri.

Perkembangan yang mendorong penilaian kebutuhan adalah timbulnya minat menganalisis sistem dan perencanaan yang sistematis, pergerakan akuntabilitas, dengan penekanan yang lebih baik pada output dari pada input atau proses, dan menggunakan teknik manajemen baru, utamanya sistem pembiayaan, pemograman, perencanaan, dan manajemen sesuai tujuan. Upaya mencukupi konsistensi kebutuhan yang diperlukan institusi Lembaga Pendidikan, dan menumbuhkan minat yang bergairah dalam perencanaan program Lembaga Pendidikan yang strategik, atau perencanaan sistem terbuka dalam merumuskan kebutuhan, elemen utamanya adalah keterlibatan secara terbuka semua pihak yang terkait dan relevan, dalam merumuskan kebutuhan, untuk menentukan arah yang akan datang dalam mengelola program pelayanan belajar di Lembaga Pendidikan.

Untuk mengetahui kebutuhan yang benar-benar diperlukan, maka lebih dulu dilakukan analisis prioritas, dengan menilai kebutuhan menggunakan teknik studi korelasi. Witkin (1984:6) mengutip pendapat Kaufman (1982) mendefinisikan penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*) adalah analisis formal yang menunjukkan dan menyimpan gap, antara hasil-hasil saat ini dan yang diinginkan (Secara ideal hubungan gap dengan hasil), mengatur gap (kebutuhan) dalam hal prioritas menyeleksi kebutuhan untuk dapat dipecahkan. Penilaian kebutuhan anggaran Lembaga Pendidikan adalah kemampuan mengenali gap atau selisih, yang ada dengan standar yang telah ditentukan, dalam hasil-hasil yang menunjukkan apakah itu sesuatu yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, dan sebagai sesuatu alat yang membutuhkan satu konsensus mengenai siapa yang bertanggungjawab mengerjakan sesuatu, perlu didukung oleh peralatan dan kelengkapan yang dibutuhkan dalam perencanaan dan mengatur prioritas kebutuhan.

Ketersediaan dana pada tingkat kelembagaan pendidikan seperti Lembaga Pendidikan, permasalahannya adalah ketidaksesuaian antara sumber dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan siswa maupun personil Lembaga Pendidikan lainnya, dengan sumber dana nyata yang tersedia yang berhubungan dengan program inti dan program tambahan ekstrakurikuler, sarana dan prasarana, materi pengajaran dan pembinaan personil sebagai modal utama pelayanan belajar, yang berkualitas dan memenuhi produk yang juga berkualitas.

Tujuan *Needs Assessment*, untuk mengenali program inovatif dan kreatifitas suatu Lembaga Pendidikan, yang didukung oleh informasi dan fakta-fakta kebutuhan Lembaga Pendidikan, menggunakan metode atau teknik yang sistematis dan memperbaiki program yang dapat memecahkan masalah kebutuhan Lembaga Pendidikan, sebagai dasar yang kuat dalam penentuan kebijakan pelayanan belajar secara berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetitif dengan Lembaga Pendidikan sejenis lainnya yang paling standar sekalipun.

Kebutuhan biaya Lembaga Pendidikan swasta di kota Cirebon difokuskan pada kebutuhan operasional, penyelenggaraan Lembaga Pendidikan didasarkan pada kebutuhan nyata yaitu terdiri dari gaji dan kesejahteraan instruktur dan staff, peningkatan kegiatan proses belajar mengajar, pemeliharaan maupun penggantian sarana dan prasarana Lembaga Pendidikan, peningkatan pembinaan kegiatan kesiswaan, peningkatan kemampuan profesional guru, administrasi Lembaga Pendidikan, dan pemantauan, pengawasan, dan pembinaannya, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanang Fattah (2000:109)

III. KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan lembaga pendidikan non formal (khususnya lembaga kursus) merupakan salah satu substansi manajemen lembaga kursus itu sendiri yang akan turut menentukan berjalannya penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Sumber pendanaan lembaga kursus yang pada umumnya bersumber dari masyarakat dan pemerintah sebagai stimulan mengharuskan lembaga mempersiapkan perencanaan sampai dengan evaluasi terhadap sumber pendanaan lembaga tersebut. Strategi kemitraan yang dibangun dengan lembaga pemerintah atau lembaga lainnya memungkinkan meningkatkan sumber dana dan keberlangsungan lembaga itu sendiri. Upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga non formal di Kota Cirebon diantaranya dibentuknya himpunan lembaga kursus seperti Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia (HIPKI), menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dewan Pendidikan serta instansi terkait, untuk peningkatan kompetensi siswa, mengadakan workshop dan sebagainya. Pengelolaan administrasi keuangan juga perlu menerapkan prinsip-prinsip laporan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, dapat berjalan dengan transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami haturkan kepada :

1. Dinas Pendidikan Kota Cirebon
2. Dinas soaial Tenaga kerja Kota Cirebon
3. Ketua HIPKI Kota Cirebon
4. Ketua HILSI Kota Cirebon
5. Dunia Usaha dan Industri diwilayah kota Cirebon
6. Pimpinan/ Direktur Lembaga Pendidikan Kursus di kota Cirebon
7. Pihak yang terkait yang sulit kami sebutkan satu persatu

REFERENSI

- Anwar, Moch. Idochi (2000). *Transformasi Biaya Pendidikan Dalam Layanan Pendidikan pada Perguruan Tinggi Bandung*. Pasca Sarjana IKIP Bandung.
- Becker, Gary S. (1992). *Human Capital and Empirical Analysis with Special reference to Education*. London The University of Chicago Press.
- Cohn, Elchanan (1979). *The Economics of Education*, Ballinger Publishing Company, Cambridge, Massachusetts.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Depdiknas.
- Engkoswara (2000). *Dasar-dasar Administrasi Pendidikan*. Jakarta LP2TK
- Fattah, Nanang (2000). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Hallak, J. (1969). *The Analysis of Educational Cost and Expenditure*. Unesco, diterjemahkan oleh Drs. Harso, Bharata, Jakarta.
- Hartley, Harry, (1968). *Educational Planning, Programming, Budgeting a system Approach*, Mc. Graw Hill, Tokyo.
- Keith Davis. (1991). *Human Behavior at Work Organizational Behavior 9Six the Education*. Newyork Mc. Grew-bil Graw-Hil, Inc
- John Roe L, & Edgar L. Morphet, (1999). *The Economics and Financing of Education*. Prentice Hall, Inc, Englewood Clifs, New Jersey.
- Levin M. Henry and Hans G Schular (1987). *Financing Recurent Educational*. Sage Publication Inc., Beverly Hills, California.
- Witkin, B.R. (1984). *Assessing Needs in Educational and Social Programs*. San Fransisco: Jossey-Bays Publisher.